



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



KEBIJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



Hamzah Fansuri, S.Kom M,Sc

Analisis Kebijakan Muda, Sub Koordinator
Perumusan Kebijakan SPBE

9 Oktober 2020

TANTANGAN GLOBAL



DEMOGRAFIS

- Peningkatan populasi
- Peningkatan status sosio ekonomi
- Meningkatnya migrasi global dan pecampuran identitas
- *Less border & more connected world*



EKONOMI

- Peningkatan urbanisasi, standar hidup dan konsumerisme yang menggerus sumber daya langka
- Munculnya kelas konsumen yang menuntut pasar untuk memperbaharui produk dan mengedepankan inovasi bertahan



TEKNOLOGI

- Mengubah segala hal mulai dari cara manusia bekerja hingga berkomunikasi
- *Internet of Things* (IOT) mendorong dunia dan usaha pemerintahan untuk mentransformasi model pelayanan
- Pengembangan *Artificial Intelligence* dalam penyelenggaraan pemerintahan



HUKUM

- Beralih pada cara dan strategi yang lebih inovatif untuk penegakan hukum dan memberikan keadilan
- Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum membutuhkan integritas tinggi
- Meningkatnya potensi kejahatan cyber

ISU-ISU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



Responsif

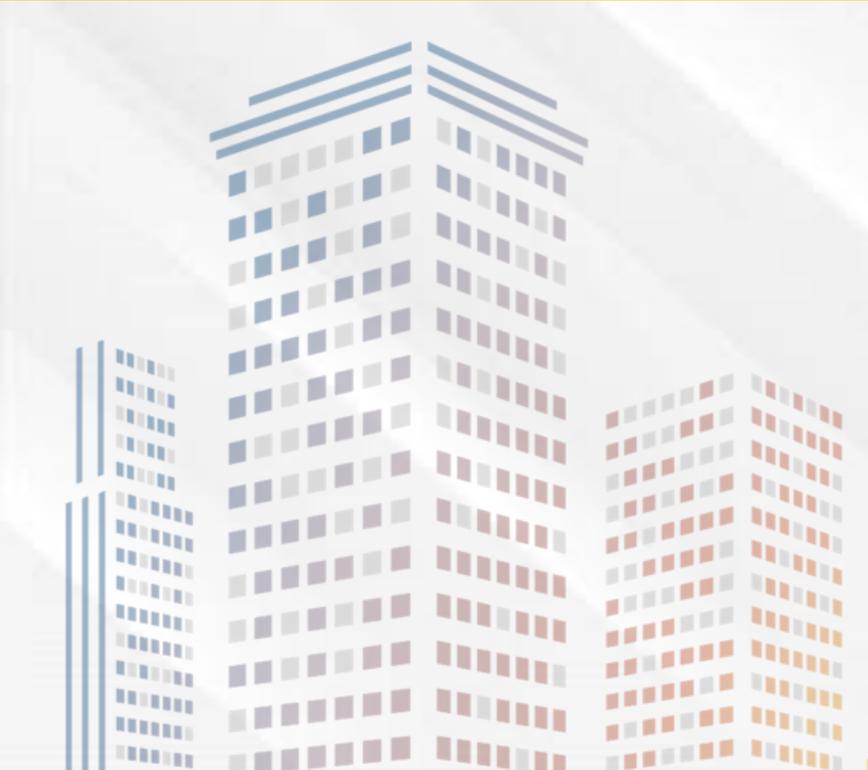
Pemerintahan harus cepat memberikan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat

Adaptif

Pemerintahan yang mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif

Evidence based policy

Pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada bukti/fakta



VISI & MISI INDONESIA MAJU 2020-2024



VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA
MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
- 8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

5 LANGKAH PERCEPAT TRANSFORMASI DIGITAL

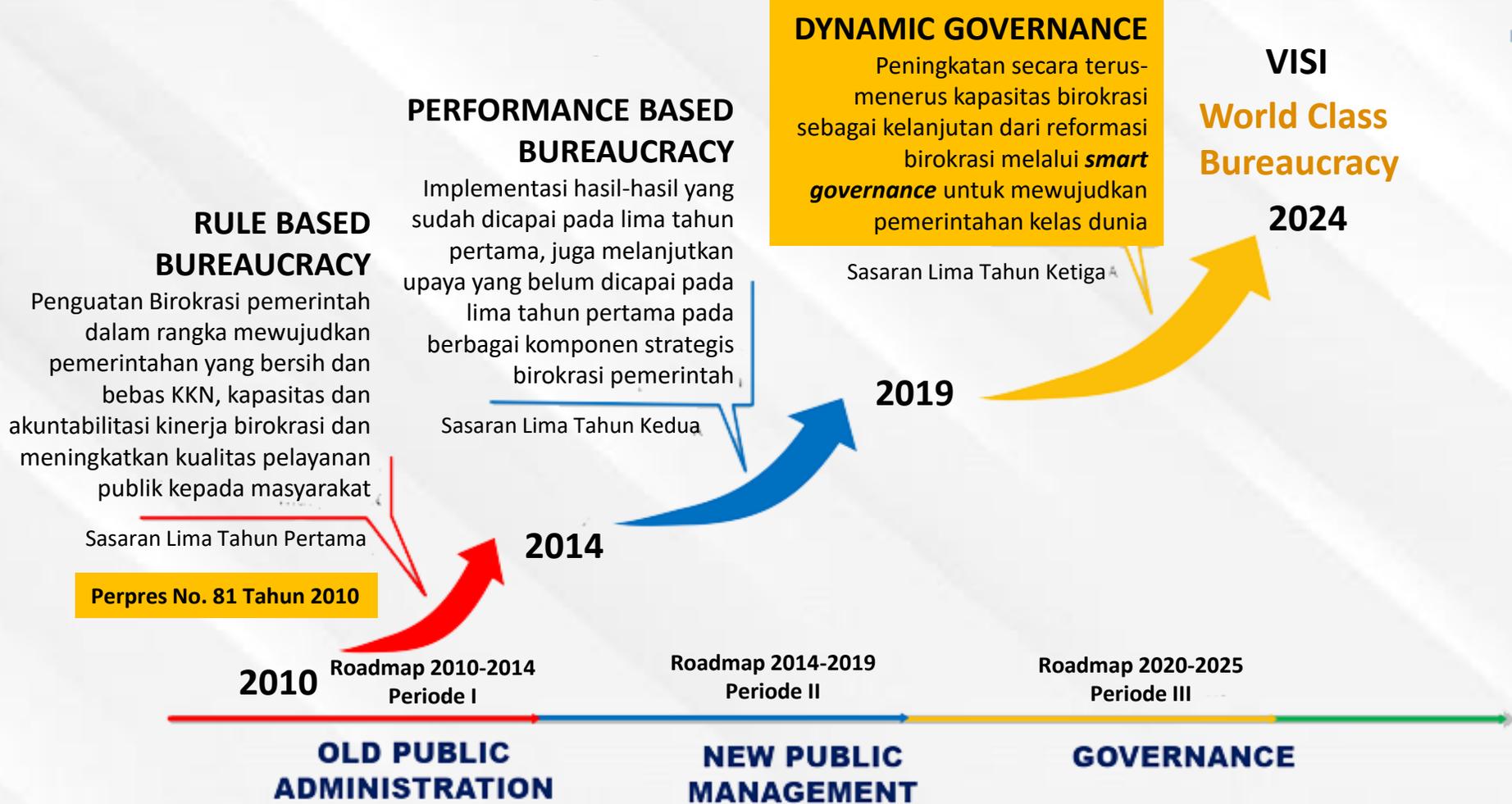
1. “Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet.”
2. “Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.”
3. “Percepat integrasi pusat data nasional.”
4. “Siapkan kebutuhan SDM talenta digital.”
5. “Yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya.”



Presiden Jokowi
Senin, 3 Agustus 2020

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

World Class Bureaucracy dengan pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang efektif-efisien



PROSES TRANSFORMASI MENUJU SMART GOVERNANCE



Praktek Pemerintahan
Dinamis 2025

Pengembangan
Grand Design
Tata Kelola
Kepemerintahan
mendukung
pencapaian Visi
Indonesia 2045



KARAKTERISTIK SMART GOVERNANCE



STRUKTUR

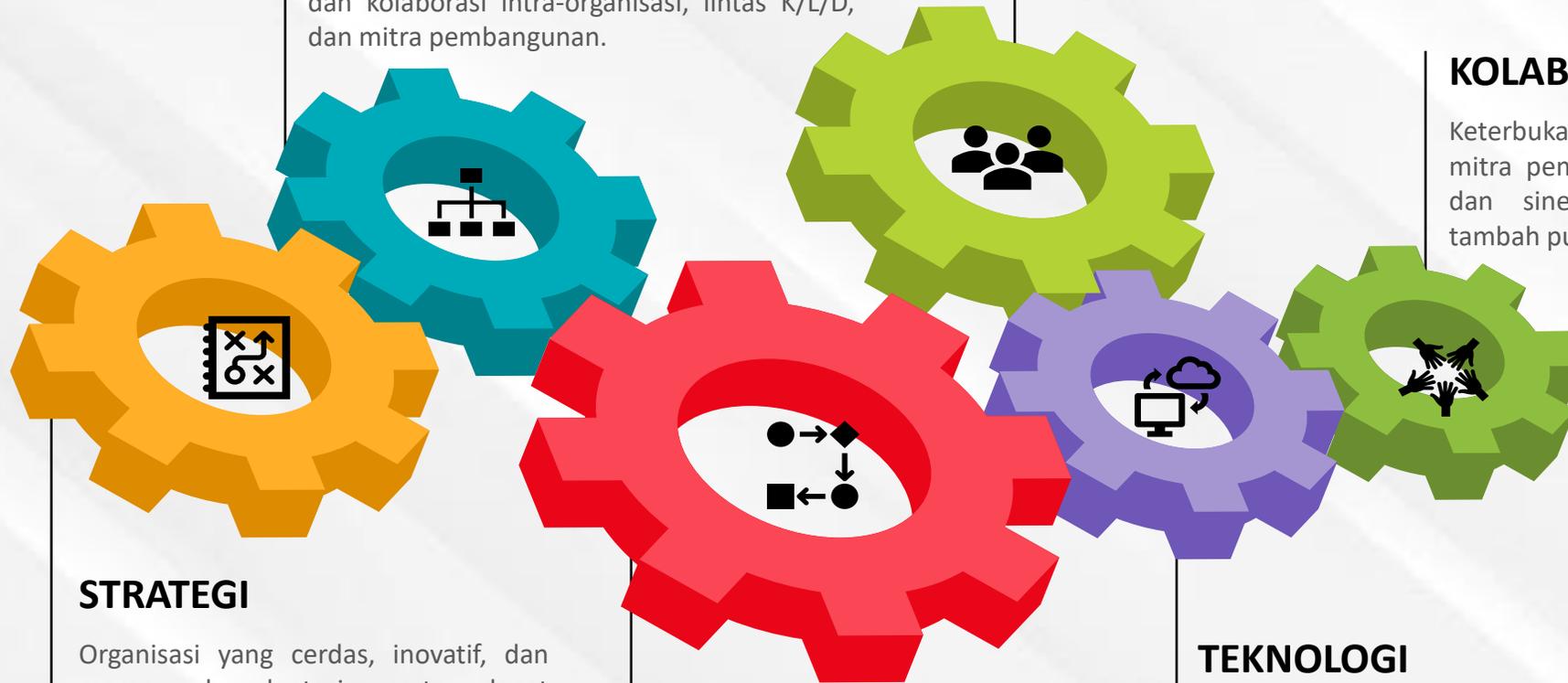
Struktur yang “tepat fungsi, tepat ukuran, tepat proses”, dengan peran yang jelas dan akuntabel; Mampu membangun koordinasi dan kolaborasi intra-organisasi, lintas K/L/D, dan mitra pembangunan.

SDM

SDM ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bebas KKN, serta dengan penerapan Sistem Merit.

KOLABORASI

Keterbukaan dan kesediaan melibatkan mitra pembangunan dalam kerjasama dan sinergi bagi penciptaan nilai tambah publik secara optimal.



STRATEGI

Organisasi yang cerdas, inovatif, dan mampu beradaptasi, serta dapat diandalkan dalam komitmen dan konsistensi pelaksanaan mandat kelembagaan

PROSES

Tatalaksana yang berorientasi pada kinerja prima, serta mendukung kecepatan dan ketepatan alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan.

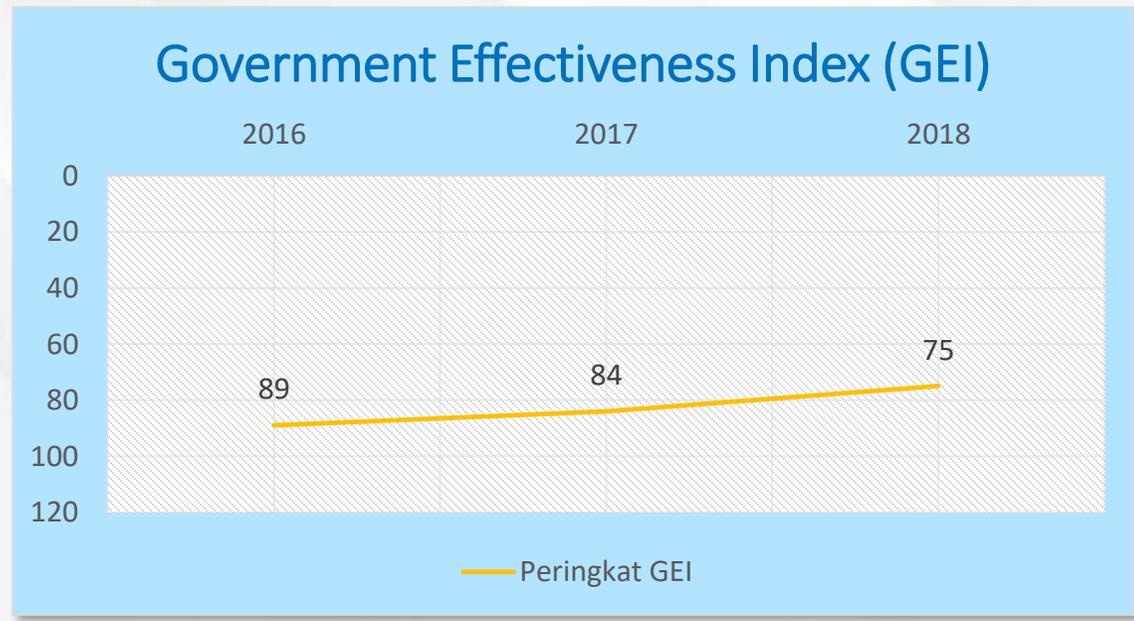
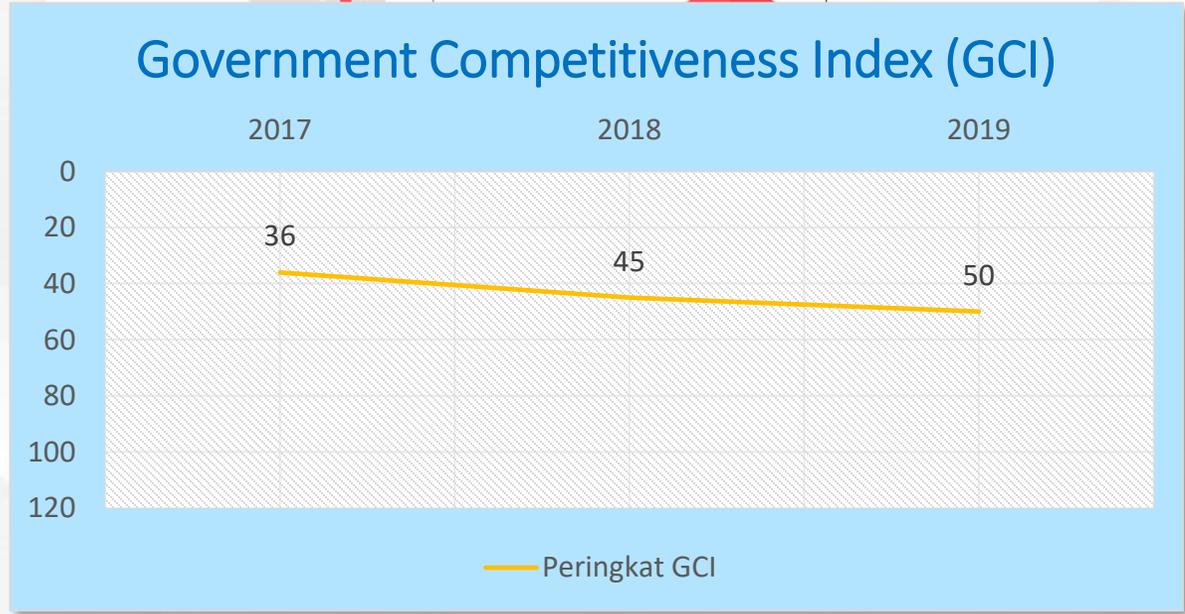
TEKNOLOGI

Pembaruan teknologi berorientasi pada kecepatan, ketepatan dan peningkatan kualitas dalam penciptaan nilai tambah publik yang optimal.

KONDISI DAYA SAING INDONESIA



Sumber: (World Bank 2017-2019)



Sumber: The World Governance Indicators (World Bank) 2016-2018

KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI



Peringkat e-Government Indonesia di Dunia

Indonesia pada Indeks UN e-Government di tahun **2020** berada pada peringkat **88** meningkat **19** level dari tahun **2018** berada pada peringkat **107**. Skor masing-masing Komponen E-Government Development Index Indonesia:

- Indeks Pelayanan Online (0.6824)
- Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (0.5669)
- Indeks Sumber Daya Manusia (0.7342)

Sumber : UN e-Government Survey



KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI

Tabel Peringkat EGDI Negara ASEAN

No	Negara	Grup	Peringkat	Nilai EGDI
1	Singapura	Very High EGDI	11	0,9150
2	Malaysia	Very High EGDI	47	0.7892
3	Thailand	Very High EGDI	57	0.7565
4	Brunei Darussalam	High EGDI	60	0.7389
5	Filipina	High EGDI	77	0.6892
6	Vietnam	High EGDI	86	0.6667
7	Indonesia	High EGDI	88	0.6612
8	Kamboja	High EGDI	124	0.5113
9	Myanmar	Middle EGDI	146	0.4316
10	Laos	Middle EGDI	167	0.3288

KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI

E-Participation Index Negara Asean

No	Negara	Grup	Peringkat	Nilai EGDI
1	Singapura	Very High EGDI	6	0.9762
2	Malaysia	Very High EGDI	29	0.8571
3	Thailand	Very High EGDI	51	0.7738
4	Indonesia	Very High EGDI	53	0.7500
5	Filipina	Very High EGDI	57	0.7500
6	Vietnam	High EGDI	70	0.7024
7	Brunei Darussalam	High EGDI	100	0.5476
8	Kamboja	Middle EGDI	129	0.4167
9	Myanmar	Middle EGDI	168	0.2619
10	Laos	Low EGDI	175	0.2143

Open Government Data Index Negara Asean

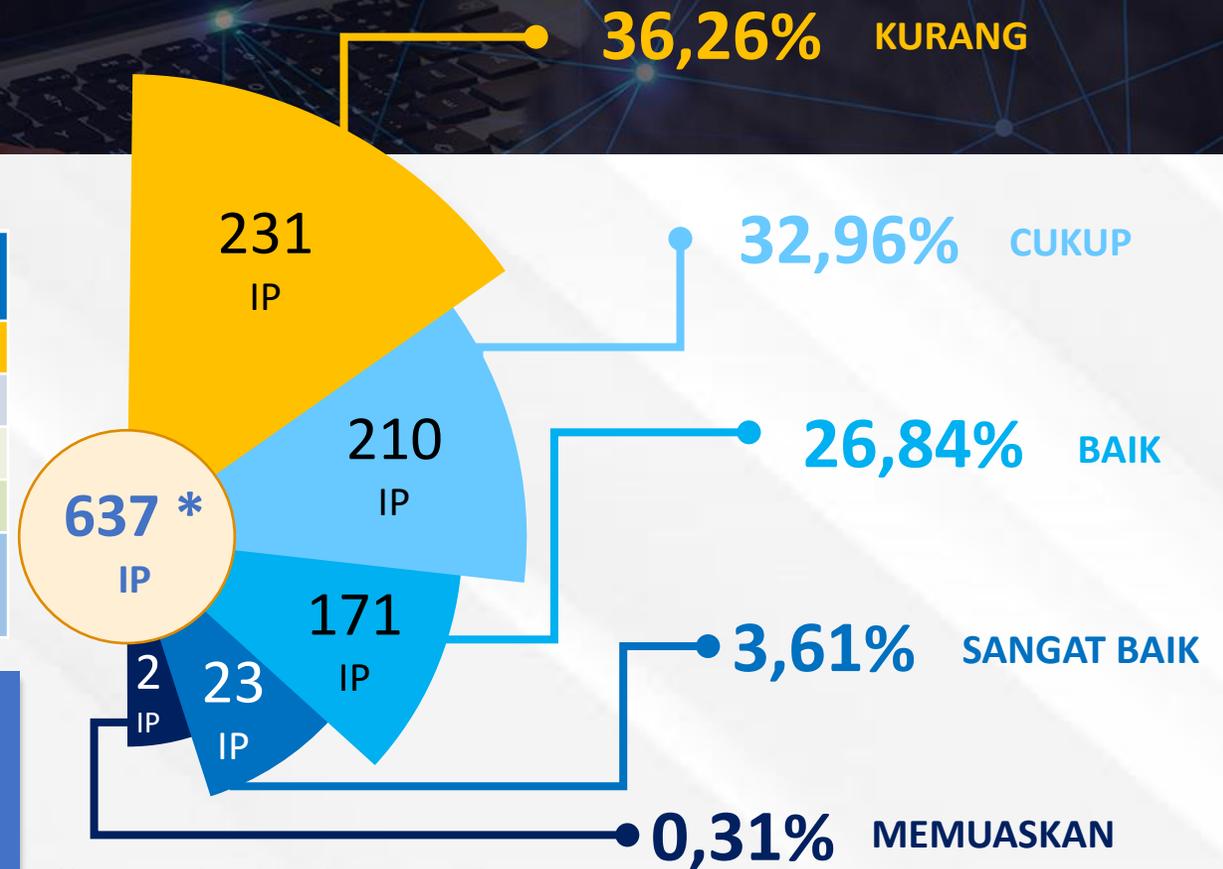
No	Negara	Grup	Nilai OGDI
1	Indonesia	Very High OGDI	1.0000
2	Singapura	Very High OGDI	1.0000
3	Malaysia	Very High OGDI	1.0000
4	Thailand	Very High OGDI	1.0000
5	Filipina	Very High OGDI	1.0000
6	Vietnam	Middle OGDI	0.6760
7	Brunei Darussalam	Middle OGDI	0.5250
8	Kamboja	Low OGDI	0.3240
9	Myanmar	Low OGDI	0.2354
10	Laos	Low OGDI	0.0000

KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI

INDEKS SPBE NASIONAL

Deskripsi	2018	2019	Peningkatan
Indeks SPBE Nasional	1,98	2,18	0,20
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	0,20
Indeks Domain Tata Kelola	1,75	1,87	0,12
Indeks Domain Layanan	2,18	2,40	0,22
Jumlah IP Berpredikat "Baik" atau lebih tinggi	82 IP (13,31%)	196 IP (31,81%)	114 IP (18,51%)

- Kegiatan Evaluasi SPBE dilakukan kepada 637 K/L/D Indeks SPBE Nasional Tahun 2019 adalah 2,18 dengan predikat "Cukup".
- Indeks SPBE Nasional menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di K/L/D dilaksanakan secara sendiri-sendiri (silo) dan belum dilakukan kolaborasi/integrasi antar K/L/D.



*) Termasuk 34 Kepolisian Daerah

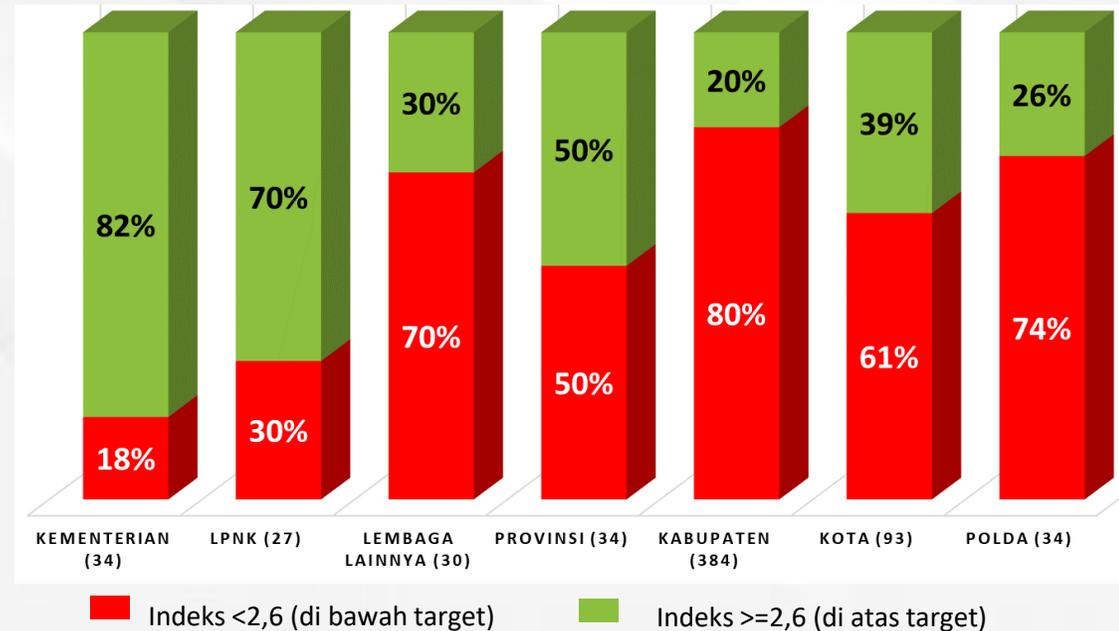
KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI



INDEKS SPBE NASIONAL, INSTANSI PUSAT, DAN PEMDA

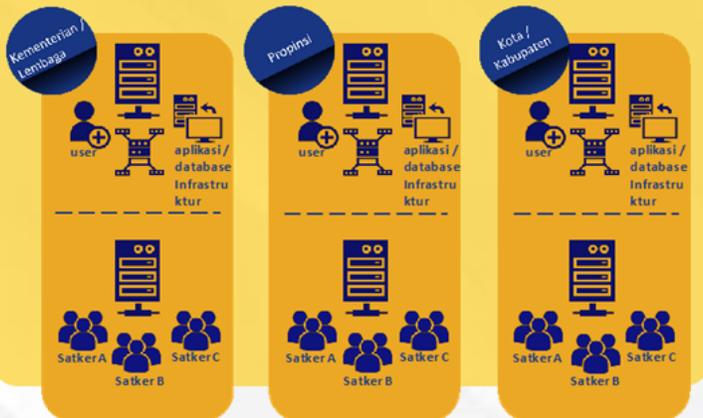
Deskripsi	Indeks SPBE 2018	Indeks SPBE 2019	Peningkatan
Penerapan SPBE Nasional	1,98 (Cukup)	2,18 (Cukup)	0,20
Penerapan SPBE Instansi Pusat (Kementerian/LPNK/Lembaga Negara)	2,80 (Baik)	2,97 (Baik)	0,17
Penerapan SPBE Pemda	1,87 (Cukup)	2,07 (Cukup)	0,20

Distribusi Predikat Diatas Baik Berdasarkan Jenis Kelembagaan



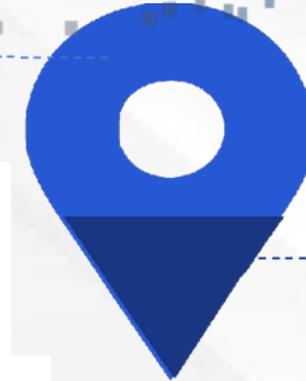
KONDISI PENERAPAN SPBE SAAT INI

- Terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri
- Masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif

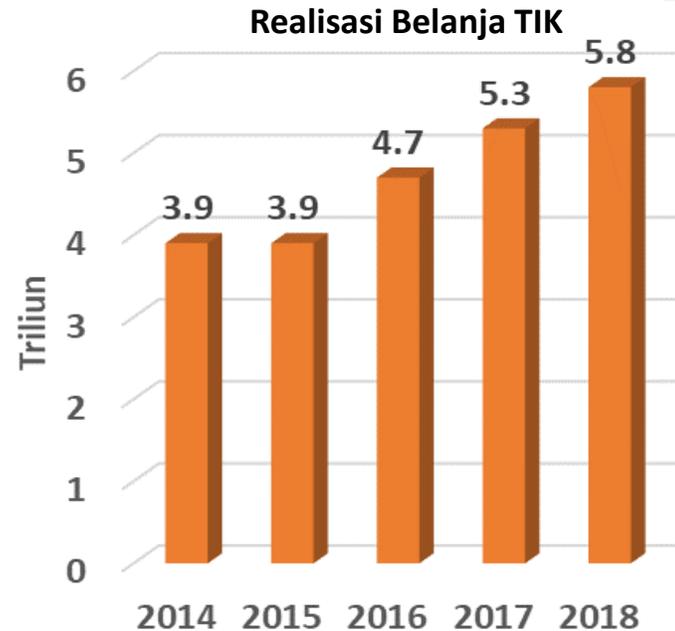


65%
Aplikasi Umum

35%
Aplikasi Khusus



Sumber: Wantiknas, 2016



Sumber: Kementerian Keuangan

Dampak Berantai

- Pemborosan anggaran, belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30%
- Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
- Risiko keamanan informasi
- Validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya

KRITIK ATAS CARA KERJA PEMERINTAH



KEBIJAKAN SPBE

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Definisi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Tujuan SPBE



Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel



Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya



Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

Cakupan Layanan SPBE



KERANGKA PERATURAN PRESIDEN

Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu

Manajemen SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan



Penyelenggara SPBE

- Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Percepatan Penerapan SPBE

Implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi:

- Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan
- Integrasi data kepegawaian
- Integrasi kearsipan
- Integrasi pengaduan publik
- Pembangunan Pusat Data Nasional

PERAN SPBE DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN



Fungsi Pemerintahan mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara terdiri atas fungsi pelayanan, fungsi kebijakan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan.

PELAYANAN

Memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat dimanapun dan kapanpun.

Peran SPBE adalah memberi kemudahan akses layanan untuk masyarakat melalui e-services

PEMBANGUNAN

Melaksanakan pembangunan di berbagai sektor seperti perdagangan, infrastruktur, kelautan, kesehatan, Pendidikan, dan lainnya.

Peran SPBE adalah memfasilitasi berbagai sistem informasi, analisis data, artificial intelligence untuk membantu pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor sesuai sasaran.



KEBIJAKAN

Menyusun dan menerbitkan kebijakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Peran SPBE adalah menyediakan akses dan integrasi data dalam penyusunan kebijakan berlandaskan data dan fakta misalnya Big Data Pemerintah

PEMBERDAYAAN

Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Peran SPBE adalah memudahkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan kebijakan pemerintahan berupa layanan partisipasi dan pengaduan online.

FAKTOR PENDORONG PEMBANGUNAN SPBE

PERUBAHAN EKSTERNAL

GLOBALISASI YANG MASIF DAN MENYELURUH
(Global Governance)



PENCIPTAAN PENGETAHUAN
(Knowledge-based Governance)



PERKEMBANGAN ICT DAN DISRUPSI
(Digital Governance)



Trasformasi Digital melalui pembangunan SPBE merupakan solusi strategis bagi organisasi yang adaptif, responsif, dan dinamis terhadap perubahan internal dan eksternal

PERUBAHAN INTERNAL

Strategi

Kemampuan yang tinggi untuk menghadapi dunia yang terus berubah pesat



Struktur

Optimalisasi sumber daya internal untuk menjalankan strategi secara akuntabel



Proses

Pengambilan keputusan dan pembelajaran yang cepat, responsif, fleksibel, transparan dan berorientasi pada kinerja



SDM Aparatur

SDM yang kompeten, kapabel, berintegritas dan inovatif serta menguasai IPTEK



Teknologi

Teknologi yang terbangun dalam sistem dan struktur yang terintegrasi



TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

Menteri PANRB

- Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Mengoordinasikan seluruh program SPBE Nasional
- Mengoordinasikan proses bisnis pemerintahan
- Menetapkan aplikasi umum
- Menetapkan manajemen risiko, SDM, perubahan

Menteri PPN/ Bappenas

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE K/L dan Nasional
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

Menteri Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE K/L dan Nasional

Kepala BPPT

- Melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi Umum
- Menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi



Menteri Kominfo

- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi
- Mengoordinasikan pembangunan infrastruktur TIK
- Kebijakan umum audit TIK
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan

Menteri Dalam Negeri

- Mengoordinasikan proses bisnis Pemda
- Mengoordinasikan penerapan SPBE di Pemda

Kepala BSSN

- Melaksanakan pengamanan SPBE
- Menyusun standar keamanan SPBE Nasional
- Menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan SPBE

KEBIJAKAN SPBE TINGKAT MESO

Untuk dapat melaksanakan Perpres SPBE secara menyeluruh, diperlukan kebijakan SPBE tingkat meso yang disusun oleh anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagai pendukung pelaksanaan SPBE pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

- Audit TIK
- Interoperabilitas
- Manajemen Layanan
- Manajemen Aset TIK

Kementerian
Kominfo



- Manajemen Data
- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SPBE

Kementerian
PPN/Bappenas



- Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional
- Manajemen Risiko SPBE
- Manajemen Perubahan
- Jabatan Fungsional terkait SPBE
- Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Penetapan Aplikasi Umum

Kementerian
PANRB



- Audit Aplikasi
- Audit Infrastruktur
- Manajemen Pengetahuan

BPPT



- Audit Keamanan
- Manajemen Keamanan Informasi

BSSN





ARSITEKTUR SPBE

ARSITEKTUR SPBE



ARSITEKTUR SPBE

Definisi:

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

SUBSTANSI ARSITEKTUR SPBE

- Model Referensi
- Domain Arsitektur

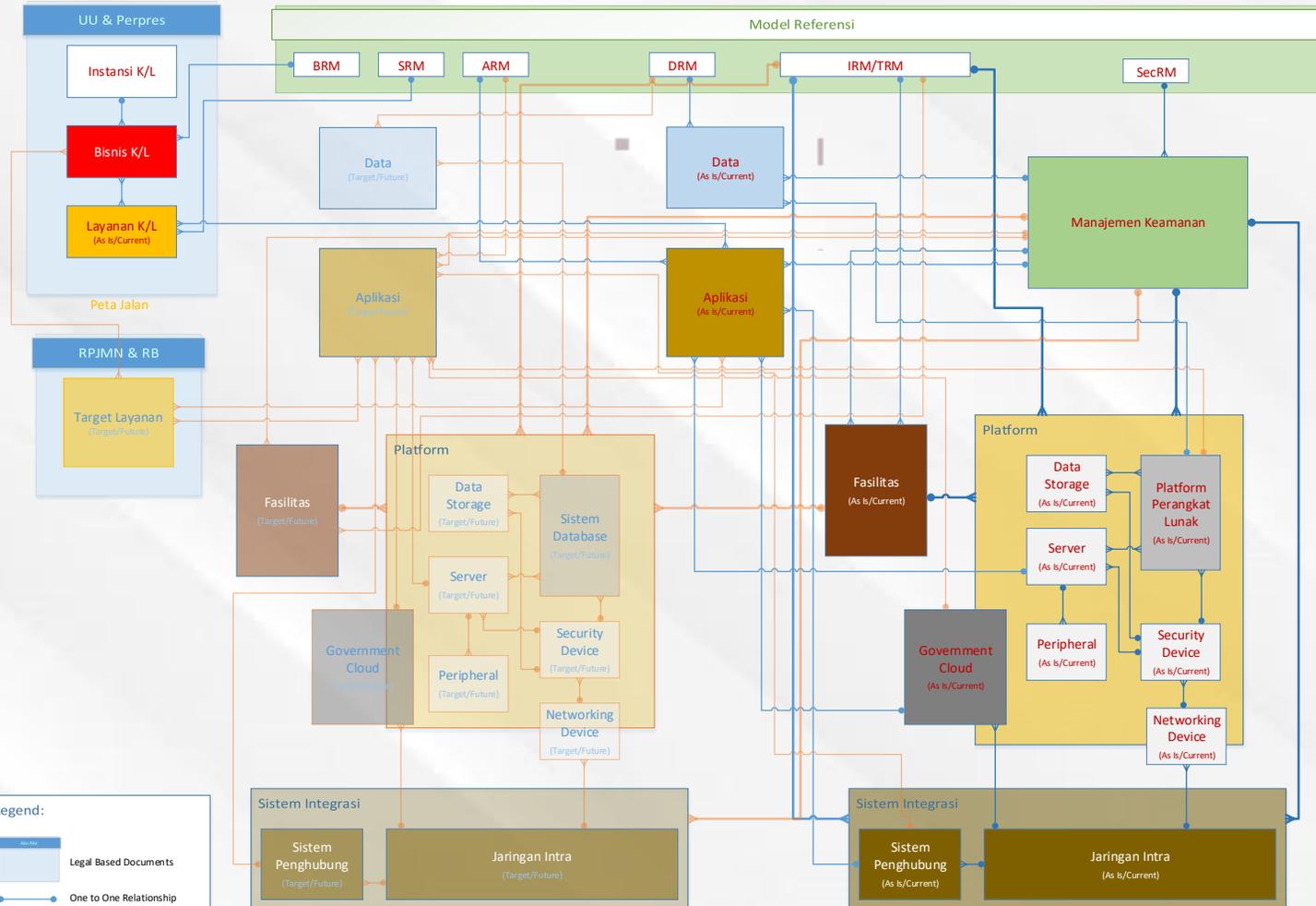
KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

- Penyusunan konsep awal model referensi Arsitektur
- Penyusunan meta item

ARSITEKTUR SPBE

Model Referensi Arsitektur

Model Meta Item Arsitektur



Meta Model Arsitektur SPBE Nasional 2020 - 2024

Model Referensi Bisnis

menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Model Referensi Layanan

menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan baik secara kelembagaan ataupun lintas kelembagaan

Model Referensi Data

menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang digunakan dalam menghasilkan layanan baik pada sektor tertentu ataupun berbagi pakai lintas sektor

Model Referensi Aplikasi

menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada bisnis tertentu

Model Referensi Infrastruktur

menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu

Model Referensi Keamanan

menguraikan jenis manajemen keamanan yang diterapkan pada domain data, aplikasi, dan infrastruktur dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

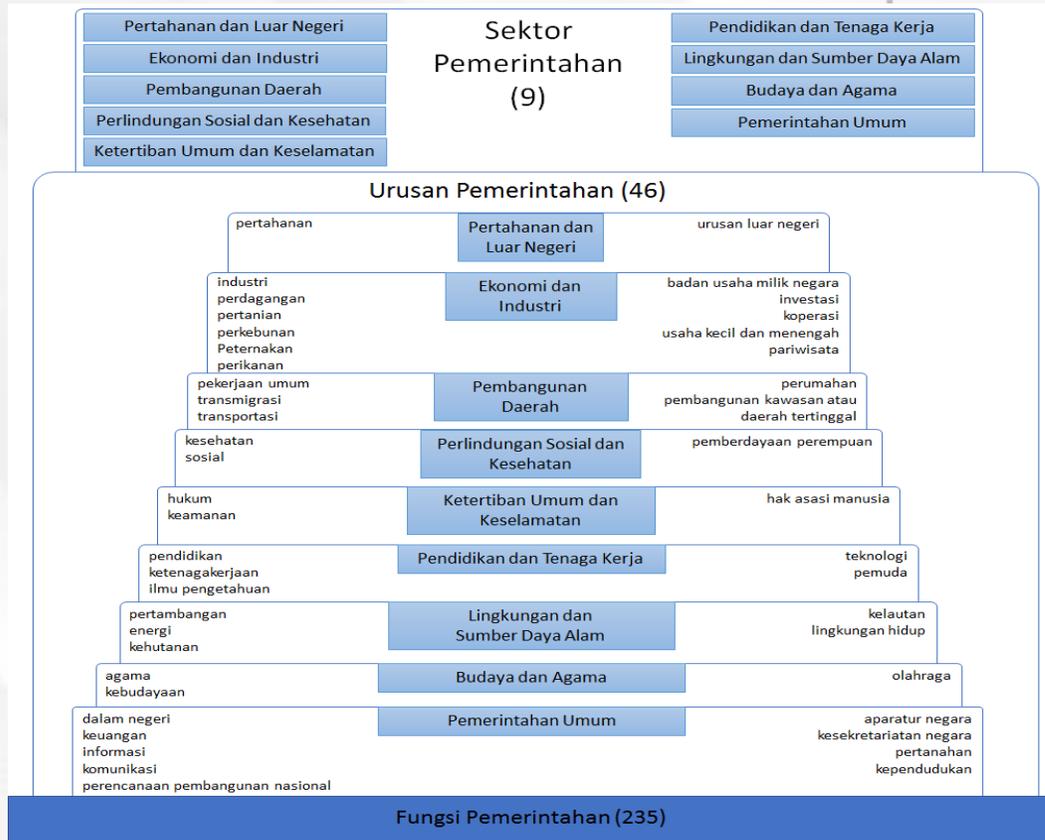
Domain Arsitektur



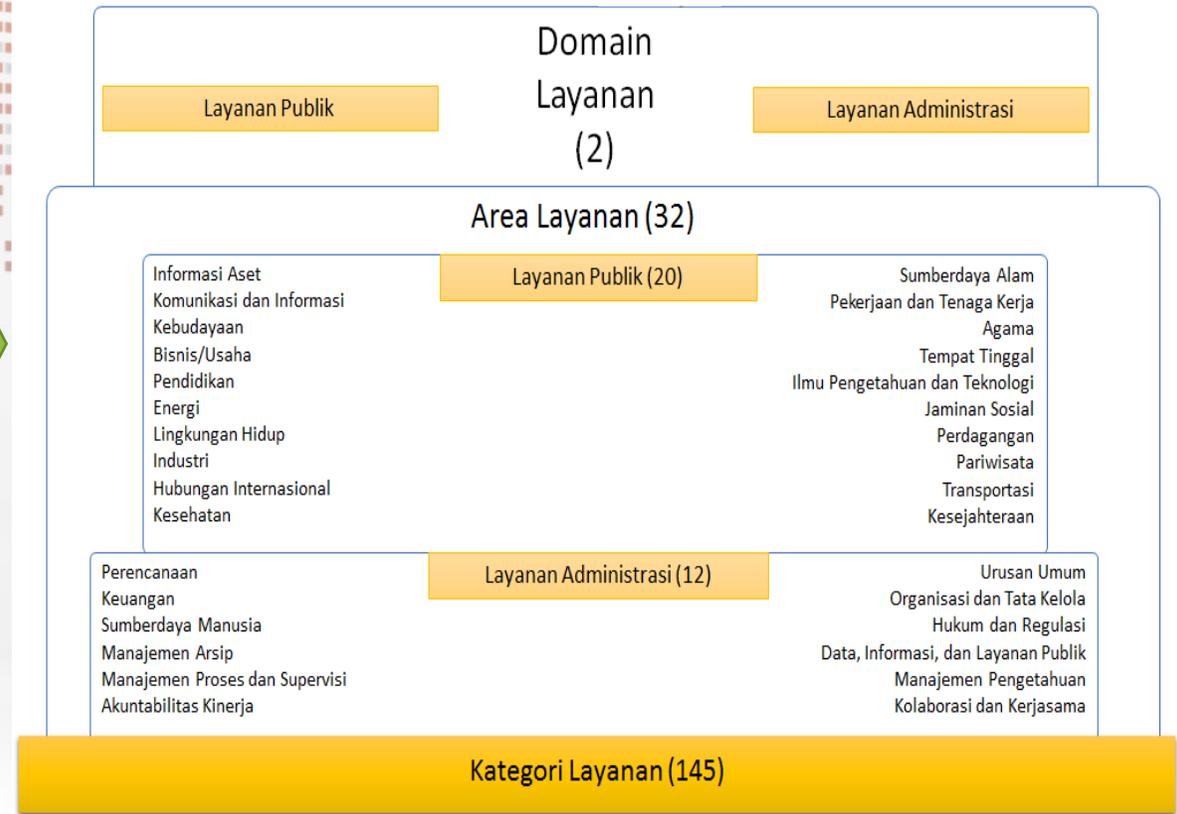
- Arsitektur Bisnis
- Arsitektur Data
- Arsitektur Layanan
- Arsitektur Infrastruktur
- Arsitektur Aplikasi
- Arsitektur Keamanan

ARSITEKTUR SPBE

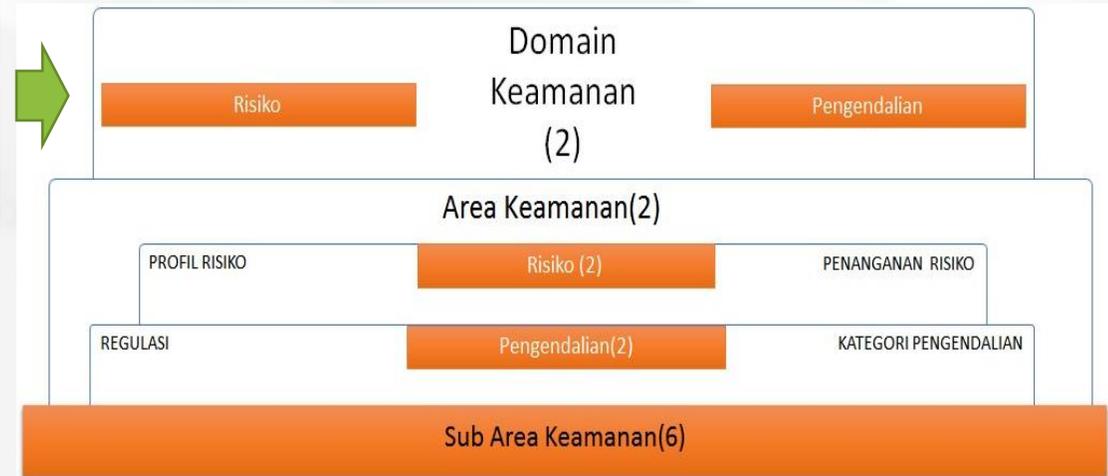
Model Referensi Arsitektur Bisnis



Model Referensi Arsitektur Layanan

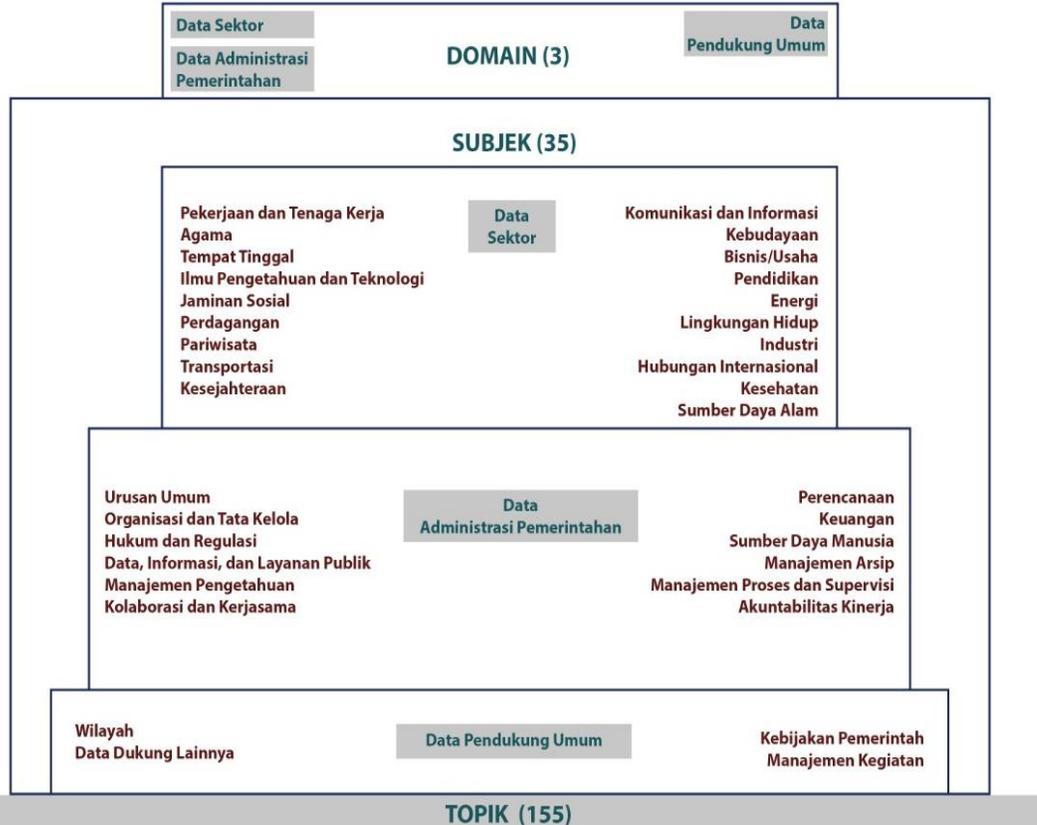


Model Referensi Arsitektur Keamanan

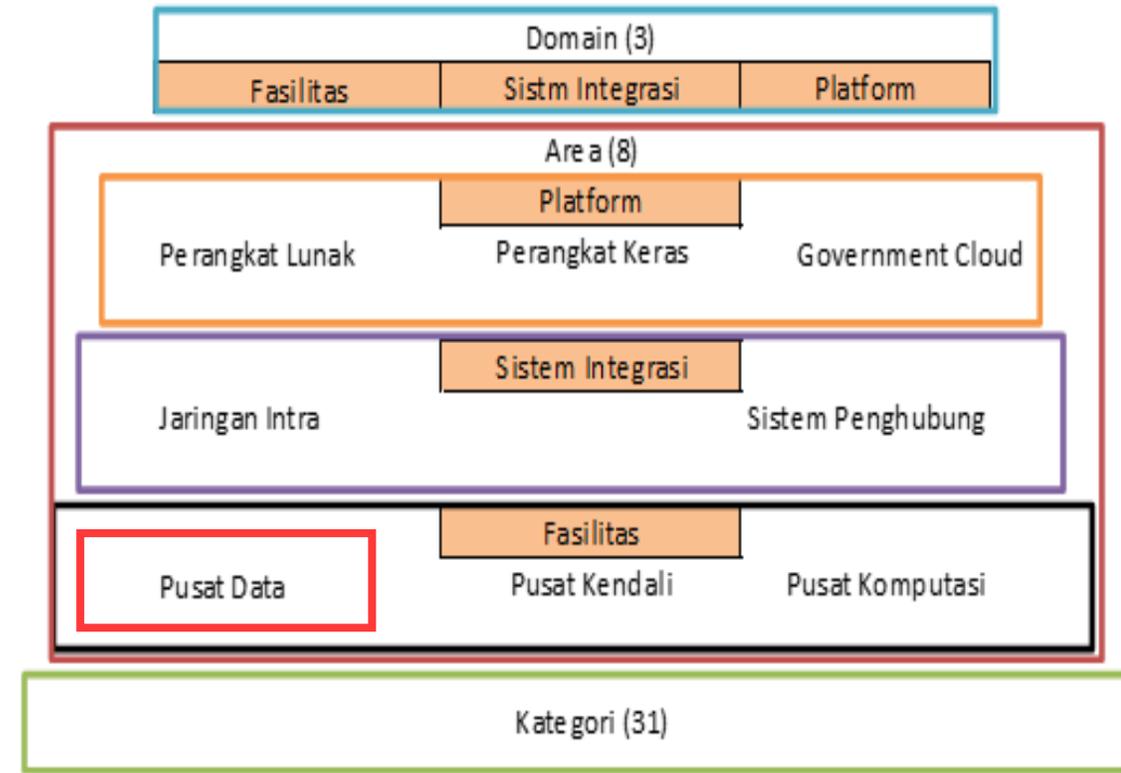


ARSITEKTUR SPBE

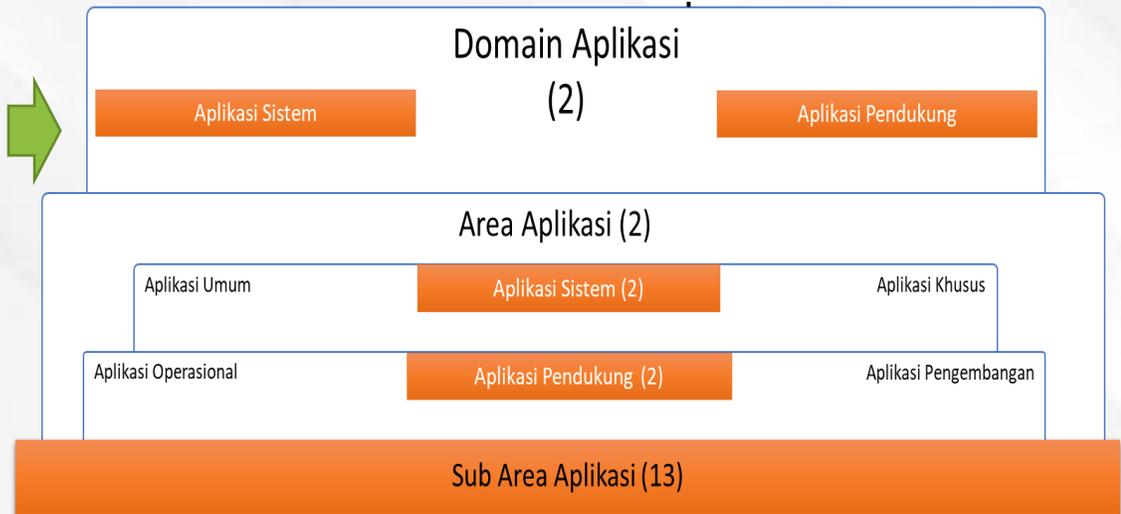
Model Referensi
Arsitektur Data



Model Referensi
Arsitektur
Infrastruktur



Model Referensi
Arsitektur
Aplikasi





MANAJEMEN RISIKO SPBE



Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.



Risiko Positif SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan **meningkatkan** peluang keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dalam penerapan SPBE

Risiko Negatif SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan **menurunkan** peluang keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dalam penerapan SPBE

Tujuan

- Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan
- Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan
- Meningkatkan kepatuhan peraturan
- Menciptakan budaya sadar risiko



Manfaat

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu
- Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemerintah
- Meningkatkan kinerja pemerintah

MANAJEMEN RISIKO SPBE

Tujuan
untuk membantu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

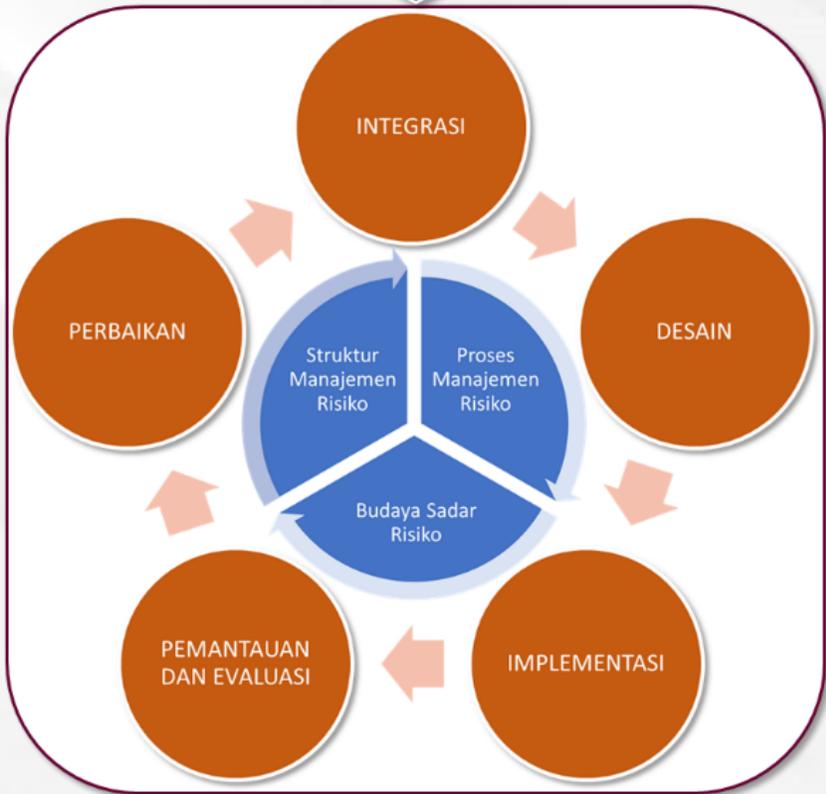


Penggunaan
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat **mengadopsi** secara langsung atau **memodifikasi** kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE ini sesuai dengan konteks di lingkungannya masing-masing

MANAJEMEN RISIKO SPBE

PENINGKATAN NILAI DAN PERLINDUNGAN

KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN



Prinsip Utama

menciptakan peningkatan nilai tambah dan perlindungan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE

Karakteristik Prinsip Utama

- Terintegrasi
- Terstruktur dan Komprehensif
- Dapat disesuaikan
- Inklusif
- Dinamis
- Informasi tersedia dan terbaik
- Faktor manusia dan budaya
- Perbaikan berkelanjutan

Kepemimpinan dan Komitmen

menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.

Proses Dalam Penerapan Kerangka Kerja

- Integrasi
- Desain
- Implementasi
- Pemantauan dan Evaluasi
- Perbaikan

MANAJEMEN RISIKO SPBE



Tata Kelola Manajemen Risiko

mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE, melalui:

- Struktur Manajemen Risiko
- Budaya sadar risiko SPBE

Proses Manajemen Risiko rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian proses kegiatan organisasi untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan proyek.

Proses ini terdiri atas:

1. Komunikasi dan konsultasi
2. Penetapan risiko SPBE
3. Penilaian risiko SPBE
4. Penanganan risiko SPBE
5. Pemantauan dan Evaluasi
6. Pencatatan dan Pelaporan

- Penerapan Manajemen Risiko dalam **Pusat Data Nasional** diperlukan untuk lebih menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari penerapan SPBE di Pusat Data Nasional.
- Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE berfungsi sebagai pemandu penerapan Manajemen Risiko SPBE yang diintegrasikan dengan proses kegiatan pemerintahan.
- Tata kelola perlu dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE yang disesuaikan dengan konteks organisasi dan membangun budaya sadar risiko yang melibatkan semua pemangku kepentingan.



EVALUASI SPBE

LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI SPBE



PERPRES 95/2018



PERMENPANRB 5/2018

Pedoman **Evaluasi SPBE** digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian/evaluasi SPBE untuk **mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

REVISI TERHADAP PERMENPANRB 5/2018

PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 terbit lebih dulu (9 bulan 11 hari) sebelum Perpres 95 Tahun 2018 terbit.

Beberapa **amanat** Perpres 95 Tahun 2018 yang **belum terakomodasi** dalam PermenPANRB No. 5 Tahun 2018, antara lain:

- Arsitektur SPBE (Pasal 6–12)
- Peta Rencana SPBE (Pasal 13–19)
- Jaringan Intra Pemerintah (Pasal 32)
- Sistem Penghubung Layanan (Pasal 33)
- Pembangunan Aplikasi Terpadu (Pasal 34–39)
- Keamanan SPBE (Pasal 40–41)
- Manajemen SPBE: Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Layanan, Manajemen SDM SPBE, Manajemen Perubahan, Manajemen Pengetahuan (Pasal 46–54)
- Audit TIK: Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur, Audit Keamanan (Pasal 55–58)



EVALUASI SPBE



PERMENPANRB 5/2018

DOMAIN (3)
ASPEK (7)
INDIKATOR (35)

PERMENPANRB 59/20

DOMAIN (4)
ASPEK (8)
INDIKATOR (47)

Indeks

SPBE

Domain

Kebijakan Internal

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Aspek

Kebijakan Tata Kelola SPBE

Kebijakan Layanan SPBE

Kelembagaan/ Penyelenggara SPBE

Perencanaan dan Strategi

TIK

Penerapan Manajemen

Audit TIK

Layanan Administrasi Pemerintahan

Layanan Publik

Indikator

7 | 10

10 | -

2 | 2

2 | 4

3 | 4

- | 8

- | 3

7 | 10

4 | 6

Semula

Menjadi

EVALUASI SPBE

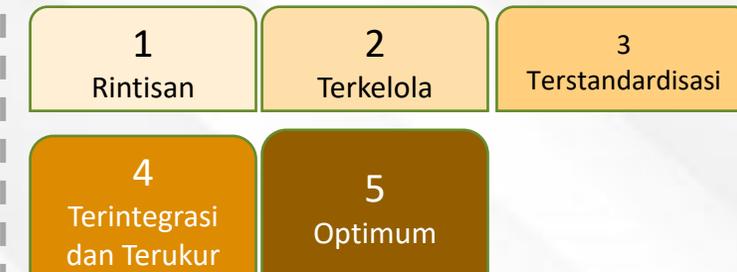


METODOLOGI EVALUASI SEBELUMNYA

Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Layanan SPBE



Tingkat Kematangan Kebijakan dan Tata Kelola



Tingkat Kematangan Layanan



EVALUASI SPBE

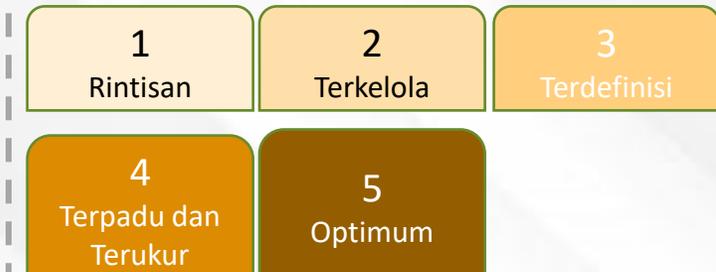


METODOLOGI EVALUASI BARU

Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Layanan SPBE



Tingkat Kematangan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen



Tingkat Kematangan Layanan



EVALUASI SPBE

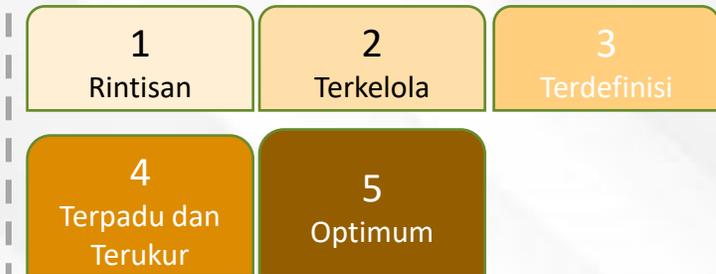


METODOLOGI EVALUASI BARU

Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Layanan SPBE



Tingkat Kematangan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen



Tingkat Kematangan Layanan



EVALUASI SPBE



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Revisi	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Sebelumnya
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	
Aspek 1	<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	X
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	X
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	X
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE

EVALUASI SPBE



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Domain 2	Tata Kelola SPBE	
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	X
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Rencana Induk SPBE
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Rencana Induk SPBE
Indikator 13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	
Indikator 19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Tim Pengarah SPBE
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	X

EVALUASI SPBE



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Domain 3	Manajemen SPBE	
Aspek 5	<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	X
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	X
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	X
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	X
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia	X
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	X
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	X
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	X
Aspek 6	<i>Audit TIK</i>	
Indikator 29	Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE	X
Indikator 30	Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	X
Indikator 31	Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE	X
Domain 4	Layanan SPBE	
Aspek 7	<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	Layanan Manajemen Penganggaran

EVALUASI SPBE



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan	Layanan Naskah Dinas
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	X
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah	Layanan Whistle Blowing System
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	X
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	Layanan Manajemen Kinerja
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	X
Indikator 44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 3	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1

“Masih terdapat 25 indikator yang sama dengan indikator penilaian SPBE sebelumnya”

EVALUASI SPBE



Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data		
Tingkat	Kriteria		
1	Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Pusat Data telah digunakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik .		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data.		

EVALUASI SPBE



PEMANTAUAN

01

TAHAP PERSIAPAN

- Penyusunan Perencanaan;
- Pembentukan Tim Asesor;
- Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

02

TAHAP PELAKSANAAN

- Penilaian mandiri;
- Penilaian dokumen;

03

TAHAP PELAPORAN

- Indeks SPBE;
- Indeks Domain;
- Indeks Aspek; dan,
- Nilai Indikator.

EVALUASI

01

TAHAP PERSIAPAN

- Penyusunan Perencanaan;
- Pembentukan Tim Asesor;
- Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

02

TAHAP PELAKSANAAN

- Penilaian mandiri;
- Penilaian dokumen;
- Penilaian interviu;
- Penilaian visitasi (jika diperlukan).

03

TAHAP PELAPORAN

- Indeks SPBE;
- Indeks Domain;
- Indeks Aspek;
- Nilai Indikator; dan,
- Rekomndasi perbaikan.



PERCEPATAN SPBE

PERCEPATAN SPBE



APLIKASI UMUM



Bidang
Penganggaran
Berbasis Kinerja

- Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kinerja, monev
- Target: Selesai Tahun 2023

Koordinator:
Kementerian
PPN/Bappenas

APLIKASI UMUM



Bidang
Kepegawaian

- Integrasi layanan kepegawaian antara BKN dan Instansi Pemerintah
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:
Kementerian PANRB

APLIKASI UMUM



Bidang
Kearsipan

- Integrasi layanan kearsipan dinamis
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:
Kementerian PANRB

APLIKASI UMUM



Bidang
Pengaduan
Masyarakat

- Integrasi pengaduan pelayanan publik
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:
Kementerian PANRB

INFRASTRUKTUR TIK



Bidang
Infrastruktur TIK

- Pusat Data Nasional
- Jaringan Intra-Pemerintah
- Target: Selesai Tahun 2022

Koordinator:
Kementerian Kominfo

Aplikasi Umum akan ditetapkan oleh Menteri PANRB dan mencakup persyaratan proses bisnis, persyaratan data, persyaratan teknologi, dan persyaratan keamanan.

RENCANA LAUNCHING APLIKASI UMUM

Launching Aplikasi Umum

- Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD)
- Bidang Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N LAPOR!)

Menteri PANRB & anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Kepala Lembaga terkait akan meluncurkan aplikasi umum tersebut pada akhir Oktober 2020

Aplikasi Umum Bidang Kepegawaian ditargetkan untuk diluncurkan pada bulan Desember 2020

Kesiapan Pusat Data Nasional sangat diperlukan untuk menempatkan dan pengoperasian Aplikasi Umum tersebut

PENUTUP

Kolaborasi yang kuat antar instansi pemerintah diperlukan untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan birokrasi berkelas dunia yang responsif, dinamis, dan inovatif.



TERIMA KASIH